

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang pesat sangat mempengaruhi kegiatan operasional suatu organisasi atau entitas untuk mencapai tujuannya. Salah satu perkembangan yang paling pesat dalam hal teknologi dan sistem informasi adalah penerapan sistem informasi yang terkomputerisasi. Banyak organisasi yang membuat sebuah sistem informasi terkomputerisasi yang dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan organisasi bersangkutan. Bahkan banyak pihak yang beranggapan bahwa kemajuan suatu organisasi dilihat dari seberapa kompleks teknologi dan sistem informasi yang diterapkan pada organisasi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Mulyani (2012) bahwa kemajuan organisasi salah satunya sangat bergantung pada teknologi dan sistem informasi.

Penggunaan teknologi dan sistem informasi ini tentu diharapkan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) dan keuntungan bagi penggunaannya. Salah satu keuntungan dari penggunaan teknologi dan sistem informasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan sehingga akan memberikan keunggulan daya saing yang dampaknya adalah tercapainya tujuan bisnis organisasi seperti keuntungan finansial

(Layungsari *et al.* 2015). Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 4 poin C tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) bahwa tujuan dari pemanfaatan teknologi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Dengan semakin tingginya tuntutan akan pelayanan yang baik pada setiap jenis organisasi, penggunaan teknologi dan sistem informasi ini tidak hanya dilakukan oleh organisasi bisnis yang memiliki tujuan untuk memperoleh profit saja. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi juga dilakukan oleh organisasi-organisasi publik yang memiliki orientasi atau tujuan organisasi untuk melayani publik (*public oriented*). Salah satunya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

Menurut Indrayathi *et al.* (2014) Puskesmas memiliki kedudukan sebagai penyedia jasa kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Sedangkan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan saja dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Suriyanto dan Trisnantoro, 2013). Menurut Indrayathi *et al.* (2014) alasan mengapa dibentuknya Puskesmas BLUD adalah karena banyaknya keluhan

masyarakat akan rendahnya kualitas pelayanan di Puskesmas. Diharapkan dengan dibentuknya Puskesmas BLUD dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga tanggung jawab sebagai penyedia jasa kesehatan tingkat pertama dapat dijalankan dengan baik.

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu instansi agar dapat berstatus BLUD. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 pasal 4 tentang pengelolaan keuangan BLU menyebutkan suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Syahril (2013) menjelaskan terkait persyaratan tersebut, dimana persyaratan substantif terkait dengan penyelenggaraan layanan umum, persyaratan teknis terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan, serta persyaratan administratif terkait dengan terpenuhinya dokumen seperti pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar layanan minimal, laporan keuangan pokok, dan laporan audit / bersedia untuk diaudit. Tiga syarat tersebut ditetapkan adalah bertujuan agar suatu instansi memiliki tata kelola organisasi yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Perubahan status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas BLUD secara mendalam merupakan perubahan pada manajemen pengelolaan keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak Puskesmas yang sudah berstatus BLUD belum memiliki staff keuangan yang memang ahli dibidangnya. Seperti yang dikutip dari cianjurekspres.com bahwa sebagian

besar Puskesmas yang berstatus BLUD di Kabupaten Cianjur belum memiliki tenaga ahli keuangan. Hal tersebut tentu menjadi hambatan tersendiri bagi suatu Puskesmas BLUD untuk dapat mengelola keuangan dengan baik dan melaporkannya sesuai dengan standar yang berlaku. Lebih lanjut pada cianjurekspres.com menyebutkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur bahwa jumlah Puskesmas yang berstatus BLUD di tahun 2016 sudah mencapai 45 Puskesmas, atau sudah seratus persen dari jumlah yang ada. Namun sebagian besar Puskesmas BLUD tersebut belum memiliki tenaga ahli dibidang keuangan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 serta masalah kurangnya tenaga ahli dibidang keuangan pada beberapa Puskesmas BLUD. Maka, suatu BLUD harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang mudah dipahami dan dioperasikan, serta mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi agar dapat terlaksana tujuan dari pemanfaat sistem itu sendiri. Sehingga dengan adanya sistem tersebut nantinya akan membantu dan mempermudah tugas yang harus diemban oleh stiap staff pada suatu instansi walaupun mereka tidak begitu kompeten dibidang keuangan dan pelaporan keuangan.

Beberapa Puskesmas BLUD di Pulau Jawa telah menerapkan sistem informasi akuntansi BLUD. Sistem ini merupakan sistem akuntansi dan keuangan yang dibuat oleh PT. Syncore Indonesia atas latar belakang permasalahan diatas yang diharapkan mampu untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pada

suatu instansi BLUD pada umumnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sistem BLUD sendiri memiliki empat modul utama yaitu modul rencana bisnis dan anggaran (RBA), modul penatausahaan (PTU), modul keuangan (KEU), dan modul akuntansi (AKT), serta ditambah dua modul tambahan yaitu modul *stuf* (STU) dan modul *utility* (UTL). Sistem BLUD ini merupakan sistem yang masih terus dikembangkan agar dapat lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja Puskesmas BLUD khususnya dan BLUD lain pada umumnya.

Suatu teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif apabila anggota dalam organisasi tersebut memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan teknologi tersebut dengan baik, (Mulyani, 2012). Karena berjalan baik atau buruknya suatu teknologi informasi akan tergantung pada kemampuan serta perilaku pengguna teknologi informasi tersebut. Jogiyanto (2007) menjelaskan bahwa, sistem teknologi informasi gagal diterapkan karena manusianya (pengguna) menolak atau tidak mau menggunakannya dengan banyak alasan. Begitu pula dengan sistem BLUD, sistem akan dapat berjalan dengan baik pemanfaatannya jika penggunanya memiliki kemampuan dan keahlian, sebaliknya sistem BLUD tidak akan dapat berjalan dengan baik jika penggunanya menolak atau tidak mau menggunakan.

Untuk mengukur tingkat penerimaan oleh pengguna akhir sistem BLUD di beberapa Puskesmas BLUD, dapat dilakukan pendekatan menggunakan model penerimaan teknologi atau *Technology Acceptance*

Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1986). Model ini sudah beberapa kali digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna teknologi informasi. Untuk model penelitian dalam penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Mulyani (2012) yang meneliti mengenai penerimaan *Student Information Terminal (S-IT)* pada AMIK Garut.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada sampel yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya menggunakan sampel dari mahasiswa, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel dari pegawai Puskesmas BLUD yang menggunakan sistem BLUD. Peneliti beranggapan bahwa perbedaan sampel tersebut dapat memberikan hasil yang berbeda karena penggunaan sistem didasarkan pada dua tanggung jawab dan kepentingan yang berbeda. Jika mahasiswa memiliki tanggung jawab sebatas melihat nilai kuliah, jadwal kuliah, serta mata kuliah, yang pada dasarnya tidak mewajibkan mahasiswa untuk menggunakan sistem tersebut setiap saat (*volitional behaviour*), maka berbeda dengan pegawai Puskesmas BLUD yang diharuskan untuk berinteraksi setiap saat dengan sistem karena memang itu merupakan tuntutan pekerjaan yang jika dilanggar mungkin dapat merugikan pegawai tersebut (*mandatory behaviour*).

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan nyata sistem (*actual system usage*) dipengaruhi oleh *behavioral intention to use* (BITU), dimana BITU di

pengaruhi oleh *percieved used* (PU), dan PU yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu *percieved ease of use* (PEOU) dan organisasi *e-resources*. Namun beberapa konstruk lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dilain sisi Jogiyanto (2007) menjelaskan bahwa konstruk-konstruk dalam TAM memiliki pengaruh yang sangat tinggi dan sangat efektif jika digunakan sebagai pengukur penerimaan sistem atau teknologi. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerimaan Sistem Informasi Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) pada Puskesmas BLUD di Pulau Jawa**” untuk menguji kembali penerimaan sistem menggunakan model TAM.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah desain sistem informasi akuntansi BLUD berpengaruh positif terhadap kemudahan penggunaan persepsian (*percieve ease of use*) sistem BLUD?
2. Apakah sistem informasi akutansi berpengaruh positif terhadap kemudahan penggunaan persepsian (*percieve ease of use*) sistem BLUD?
3. Apakah sistem informasi akutansi berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian (*percieve usefullnes*) sistem BLUD?

4. Apakah *users ability and skills* berpengaruh positif terhadap kemudahan penggunaan persepsian (*percieve ease of use*) sistem BLUD?
5. Apakah kemudahan penggunaan persepsian (*percieve ease of use*) berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian (*percieve usefullness*) sistem BLUD?
6. Apakah kemudahan penggunaan persepsian (*percieve ease of use*) berpengaruh positif terhadap sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*) sistem BLUD?
7. Apakah kegunaan persepsian (*percieve usefullnes*) berpengaruh positif terhadap sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*) sistem BLUD?
8. Apakah kegunaan persepsian (*percieve usefeullnes*) berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan (*behavioral intention to use*) sistem BLUD?
9. Apakah norma subjektif (*subjective norm*) berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan (*behavioral intention to use*) sistem BLUD?
10. Apakah sikap kearah penggunaan (*attitude toward using*) berpengaruh positif terhadap niat untu menggunakan (*behavioral intention to use*) sistem BLUD?

11. Apakah niat untuk menggunakan (*behavioral intention to use*) berpengaruh positif terhadap penggunaan nyata teknologi (*actual technology use*) sistem BLUD?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh desain sistem informasi akuntansi BLUD terhadap kemudahan penggunaan persepsian (*percieve ease of use*) sistem BLUD Puskesmas.
2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kemudahan penggunaan persepsian (*percieve ease of use*) sistem BLUD Puskesmas.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kegunaan persepsian (*percieve usefullnes*) sistem BLUD Puskesmas.
4. Mendapatkan bukti empiris pengaruh *users ability and skills* terhadap kemudahan penggunaan persepsian (*percieve ease of use*) sistem BLUD Puskesmas.
5. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kemudahan penggunaan persepsian (*percieve ease of use*) terhadap kegunaan persepsian (*percieved usefulness*) sistem BLUD Puskesmas.

6. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kemudahan penggunaan persepsian (*percieve ease of use*) terhadap sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*) sistem BLUD Puskesmas.
7. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kegunaan persepsian (*percieve usefullnes*) terhadap sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*) sistem BLUD Puskesmas.
8. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kegunaan persepsian (*percieve usefeullnes*) terhadap niat untuk menggunakan (*behavioral intention to use*) sistem BLUD Puskesmas.
9. Mendapatkan bukti empiris pengaruh norma subjektif (*subjective norm*) terhadap niat untuk menggunakan (*behavioral intention to use*) sistem BLUD Puskesmas.
10. Mendapatkan bukti empiris pengaruh sikap kearah penggunaan (*attitude toward using*) terhadap niat untu menggunakan (*behavioral intention to use*) sistem BLUD Puskesmas.
11. Mendapatkan bukti empiris pengaruh niat untuk menggunakan (*behavioral intention to use*) terhadap penggunaan nyata teknologi (*actual technology use*) sistem BLUD Puskesmas.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitia ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berhubungan dengan Sistem Informasi. Sehingga penelitian dengan topik ini akan menjadi lebih dapat dikembangkan dan diharapkan penelitian selanjutnya hasilnya akan menjadi lebih baik dan sempurna. Selain itu, dengan ditambahkan variabel anteseden dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penggunaan atau penerimaan terhadap suatu sistem informasi.

2. Bidang Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, khususnya bagi Puskesmas BLUD terkait penggunaan sistem BLUD itu sendiri, serta penyedia sistem BLUD untuk melakukan evaluasi terhadap sistem BLUD yang ada, sehingga dapat menjadi lebih baik dan optimal dalam pemanfaatannya.